



## DANA PENSIUN TERBAIK 2020



# KECELAKAAN LALU LINTAS...?? LAPOR KEPOLISIAN,, SELANJUTNYA JASA RAHARJA YANG BEKERJA

**KAMI YANG BEKERJA**



**1**

**JASA RAHARJA MENERIMA LAPORAN POLISI SECARA ONLINE DAN REALTIME VIA IRSMS POLRI**

**2**

**JASA RAHARJA MENGUNJUNGI RUMAH AHLI WARIS UNTUK PENGURUSAN SANTUNAN MENINGGAL DUNIA**

**3**

**KERJASAMA JASA RAHARJA DENGAN RUMAH SAKIT UNTUK PROSES PENJAMINAN KORBAN**

**4**

**JASA RAHARJA BERSINERGI DENGAN DUKCAPIL UNTUK KEABSAHAN DATA AHLI WARIS KORBAN**

**5**

**PENYERAHAN SANTUNAN SECARA TRANSFER DAN OVERBOOKING**

## DARI MANA SANTUNAN JASA RAHARJA ???

### IURAN WAJIB



**PENUMPANG MEMBELI TIKET KENDARAAN UMUM**



**DALAM SETIAP TIKET TERDAPAT IURAN WAJIB JASA RAHARJA**



**PERLINDUNGAN PENUMPANG KENDARAAN UMUM**

### SUMBANGAN WAJIB



**PEMILIK KENDARAAN MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN DI SAMSAT**



**PEMBAYARAN PAJAK TERMASUK SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN (SWDKLLJ)**



**PERLINDUNGAN TERHADAP PIHAK KETIGA YANG DIAKIBATKAN KECELAKAAN KENDARAAN TERSEBUT**

## - SANTUNAN -

**SANTUNAN BAGI AHLI WARIS KORBAN LAKA LANTAS YANG MENINGGAL DUNIA** **50JT**

**50JT** **MAKSIMAL SANTUNAN DIBERIKAN BAGI KORBAN MENDERITA CACAT TETAP**

**MAKSIMAL SANTUNAN BIAYA RAWATAN BAGI KORBAN MENGALAMI LUKA - LUKA (KHUSUS PESAWAT UDARA MAKS 25 JT)** **20JT**

**4 JT** **BIAYA PENGUBURAN BAGI KORBAN LAKA MENINGGAL DUNIA TANPA AHLI WARIS**

**BANTUAN PERTOLONGAN PERTAMA BAGI KORBAN LUKA - P3K (MAKSIMAL)** **1 JT**

**500 RIBU** **BANTUAN BIAYA AMBULANS BAGI KORBAN LUKA - LUKA (MAKSIMAL)**

**REDAKSI**

**Penasihat:**  
Mudjiharno

**Pemimpin Umum:**  
Suheri

**Pemimpin Redaksi:**  
Arif Hartanto

**Redaktur Pelaksana:**  
Aloy Tagawai

**Sekretaris Redaksi:**  
Bambang Sri Mulyadi

**Dewan Redaksi:**  
Eddy Pramana, Budi Ruseno,  
Budi Sutrisno, Budi Sulistijo

**Kuangan:**  
Heru AZ

**Pemasangan Iklan:**  
Marissa

**Fotografer:**  
Subandi

**Sirkulasi/Distribusi:**  
Subandi

**ALAMAT REDAKSI:**  
Gd. Menara Taspen, Lt.16,  
Jl Jend. Sudirman Kav. 2  
Jakarta 10220

Phone: (021) 251 4050-52 Fax: (021) 251 4051,  
E-mail: adpibusat@adpi.or.id

**PENERBIT:**  
PT JAGATMEDIA & BISNIS

## Dari Evergrande Sampai Tapering Off

Pasar keuangan dunia dikejutkan berita kekebuntuan bisnis raksasa properti Tiongkok, Evergrande. Dunia keuangan pantas dibuat waswas karena kebangkrutan Evergrande bisa memicu krisis industri properti negeri Tirai Bambu yang kabarnya berkontribusi hingga 25% terhadap PDB Tiongkok. Yang ditakutkan dunia adalah efek bola salju yang bisa ditimbulkan Evergrande. Pasar dunia juga kini sedang mengantisipasi dampak kebijakan tapering off setelah The Federal Reserve memompa likuiditas untuk pemulihan ekonomi AS. Namun belakangan, pejabat The Fed memastikan, kebijakan tapering off



atau pembatasan stimulus akan dilakukan secara bertahap, sehingga nilai pengurangan stimulus relatif kecil dari bulan ke bulan. Kepastian Evergrande membayar utang obligasi dan kepastian kebijakan Th Fed membuat pasar saham lebih optimistis dengan mebidik saham blue chips. Di dalam negeri, tren positif juga diwarnai maraknya emisi baru baik saham maupun obligasi. Tren ini digambarkan dalam tulisan utama. Simak juga kisah sukses Dapen BCA pada rubrik Profil dan artikel pendukung lainnya. Selamat membaca.

Wasallam  
*Redaksi*

## DAFTAR ISI >>

### UTAMA

**4** **KEMELUT EVERGRANDE, QUANTITATIVE EASING DAN KEBANGKITAN BLUE CHIPS**

### AKTUAL



**8** **Emisi Obligasi & Saham Menuju Rp 228 Triliun**

Nilai emisi obligasi telah mencapai Rp 78,58 triliun pada akhir Oktober 2021 dengan kecenderungan meningkat dibanding tahun lalu. Ditambah emisi saham, nilai penggalangan dana menuju Rp 228 triliun sekaligus capai rekor tertinggi.

**10** **OJK Bentuk Task Force Keuangan Berkelanjutan**



**12** **[KOLOM] Oleh: Dana Pensiun Pertamina SINERGI DANA PENSIUN PERTAMINA DAN DIRJEN DUKCAPIL**

**LAPORAN KHUSUS** Oleh: Arif Hartanto

**ADPI AWARD, YANG TETAP PERKASA DI MASA PANDEMI** 14

**PROFIL: DANA PENSIUN BCA** 16

**19** **[KOLOM] Oleh: Anang Rachmadi Digitalisasi Dana Pensiun, Perlukah?**

**22** **[KOLOM] Oleh: Siti Rakhmawati INVESTASI BERBASIS ESG**

**27** **[EKSPOSE] Seputar Kegiatan ADPI**

- In-House Training UMM
- Webinar ADPI

# KEMELUT EVERGRANDE, QUANTITATIVE EASING DAN KEBANGKITAN BLUE CHIPS

GETTY IMAGES



1,550	5,575
270 lot	349 lot
1,160	0
21,151 lot	0 lot
7,825	8,250
16 lot	1 lot
8,425	8,450
358 lot	274 lot
1,500	1,655
	200 lot
	657 lot
11,925	12,075
	120 lot
	830 lot
	4,840
	275 lot

## Kasus Evergrande dan kebijakan taper tantrum oleh The Fed dinilai tidak terlampau serius

memicu kepanikan pasar seperti tahun 2013. The Fed berjanji akan menerapkan kebijakan secara bertahap untuk menghindari gejolak. Sinyal positif ini direspons investor membidik saham blue chips, termasuk di Bursa Efek Indonesia

Tiga indeks acuan di bursa Wall Street atau New York Stock Exchange (NYSE) ditutup bervariasi pada akhir perdagangan Jumat (22/10) atau Sabtu waktu Indonesia. Indeks Dow Jones kembali mencetak rekor tertinggi setelah catatan tertinggi yang ditorehkan pada 16 Agustus 2021. Rekor terakhir merupakan catatan beruntun selama tiga pekan berturut-turut.

Pada 22 Oktober, indeks Dow Jones terkerek sekitar 74 poin, atau 0,2% menjadi 35.677,02. Sedangkan indeks S&P 500 turun tipis 0,1% menjadi 4.544,90, persis sehari sebelumnya mencetak rekor tertinggi dalam sejarah. Sedangkan indeks Nasdaq Composite turun 0,8% menjadi 15.090,20. Jika dihitung sejak awal Oktober, indeks S&P dan Dow Jones naik lebih dari 5%, sedangkan Nasdaq terkerek sekitar 4,4%.

Selain minat investor berinvestasi pada saham-saham papan atas, ada kabar positif yang berembus dari negeri Tirai Bambu. Hal itu terkait dengan kabar kepastian raksasa properti Tiongkok, Evergrande soal



pembayaran bunga yang jatuh tempo kepada pemegang obligasi asing. Kabar ini sekaligus mengalau kekhawatiran soal kemungkinan default atas pengembang properti itu.

Pasar keuangan dunia sempat khawatir, karena sejauh ini sektor properti Tiongkok menyumbang sekitar 25% terhadap PDB negara ini. Kabar soal pelunasan obligasi ini tersiar sehari setelah perusahaan mengatakan rencana divestasi unit bisnis layanan properti seharga US\$ 2,58 miliar gagal mencapai kesepakatan.

Mengutip kantor berita AFP, Evergrande telah melakukan pembayaran bunga untuk pinjaman luar negeri utama, sehari jelang batas akhir yang disepakati. Media pemerintah China pada, Jumat (22/10) ikut mengabarkan hal itu. Evergrande dilaporkan telah mengeluarkan sekitar US\$ 150 juta untuk pembayaran obligasi.

Sebelumnya, kekhawatiran tentang kegagalan Evergrande sempat mengguncang pasar keuangan dunia. Krisis yang dipicu Evergrande Group mendorong kenaikan risiko pasar yang memicu penurunan peringkat kredit. Sebelumnya, Bank sentral Tiongkok (PBoC) menyatakan bahwa risiko dari krisis raksasa properti Evergrande ke sektor keuangan dapat dikendalikan.

PboC meyakinkan bahwa setiap kejatuhan sektor keuangan akan dapat dikendalikan. Namun, Gubernur PboC, Yi Gang mengatakan, pihak berwenang terus mencermati risiko gagal bayar. "Ini terjadi akibat salah urus dan ekspansi berbahaya (di beberapa perusahaan)," kata dia. Namun, Yi Gang menegaskan, PDB Tiongkok diperkirakan masih tumbuh sekitar 8% sepanjang tahun.

Analisis Fidelity International mengatakan, tekanan sektor properti telah menjadi pusat guncangan ekonomi di Negeri Tirai Bambu. Guncangan itu diperburuk oleh krisis listrik, penguncian regional, dan strategi nol kasus Covid-19 yang memukul sektor jasa dan pendapatan siap dibelanjakan (pendapatan disposabel). "Satu-satunya kejutan dalam angka PDB Tiongkok yang dipublikasikan adalah bahwa angka

tersebut tidak lebih rendah," ujar Paras Anand, kepala investasi Asia-Pasifik Fidelity.

Kepala Ekonomi Asia Oxford Economics, Louis Kuijs percaya bahwa meskipun kekurangan listrik dan pengurangan produksi dikendalikan pada kuartal IV-201, penurunan real estat yang tertunda akan terus membebani pertumbuhan ekonomi Tiongkok secara substansial.

Pada sisi lain, penjualan ritel Tiongkok naik 4,4% dari 2,5% pada Agustus 2021 akibat pelonggaran mobilitas masyarakat di negara itu. Sedangkan

Rp 4,75 triliun. Saham-saham blue chips menjadi buruan investor asing yang juga digandrungi investor lokal. Mencermati data RTI, dalam sepekan posisi top net foreign buy mencakup saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebesar Rp 1,8 triliun. Saham BBRI dalam sepekan naik 3,53%, sedangkan dalam satu bulan ini menguat 16,71%. Selama setahun harga BBRI menguat 37,29%.

Selanjutnya saham yang banyak dikoleksi pemodal asing adalah saham PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), mencatatkan dengan nilai pembelian bersih sebesar Rp 482,5 miliar. Selama sepekan saham



Gubernur BI, Perry Warjiyo

tingkat pengangguran perkotaan di Tiongkok turun sedikit ke level 4,9%. "Pembatasan pada bisnis les privat juga bisa memukul pekerjaan kerah putih," tandas ekonom ING, Iris Pang.

## SINYAL POSITIF

Seiring jaminan yang diberikan Bank Sentral China, indeks Dow Jones mendapat momentum untuk bangkit dengan fenomena berbeda. Ada tren para investor kakap mulai berpikir realistis dengan keluar dari saham teknologi dan memburu saham blue-chip. Fenomena yang sama terjadi di pasar saham Indonesia. Selama sepekan antara 18-22 Oktober, investor asing mencatatkan pembelian bersih (net foreign buy) sebesar

BMRI sebesar 0,35%, dan dalam sebulan telah naik 18,52%. Dalam satu tahun, saham BMRI melesat 34,58%.

Saham PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) juga banyak dikoleksi asing dengan mencatatkan net foreign buy sebesar Rp 216,8 miliar. Harga saham TLKM naik 1,04% dalam sepekan, dan selam sebulan naik 8,71%. Jika dihitung selama satu tahun, saham TLKM telah naik 42,87%.

Khusus pada akhir pekan, investor asing mencatat pembelian bersih (net buy) saham di seluruh pasar senilai Rp 1,18 triliun. Di jumlah itu, pembelian bersih saham di pasar reguler oleh pemodal asing senilai Rp 1,12 triliun dan sisanya mencapai Rp 56,69 miliar di pasar

negosiasi. Net buy di pasar negosiasi dicatatkan saham PT Adaro Energy Tbk (ADRO) Rp 23,41 miliar dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) Rp 21,54 miliar.

Sedangkan lima saham dengan net buy terbanyak melanda saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) Rp 406,52 miliar, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) Rp 293,61 miliar, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Rp 113,23 miliar, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) Rp 87,56 miliar, dan PT Bank Jago Tbk (ARTO) Rp 70,35 miliar.

Merespons aksi pemodal asing, Head of Research Panin Sekuritas Nico Laurens menandakan, tingginya net buy sejalan dengan peningkatan tren komoditas. “Bahkan, sektor komoditas diproyeksikan masih positif hingga akhir tahun 2021,” ujarnya seperti dikutip investor.id.

Menurutnya, sentimen positif dari komoditas, penggerak net buy juga disumbang oleh saham-saham kelompok big caps. Meski demikian, para investor diharapkan tetap cermati risiko dari pandemi yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. “Kasus baru Covid-19 akan menjadi concern. Soal tapering The Fed, seharusnya kondisi saat ini sudah price in seperti pada 2013 lalu dengan tidak ada koreksi saat tapering berjalan,” pungkasnya.

Lonjakan belanja investor asing justru terjadi ketika investor lokal mulai mengantisipasi capital outflow akibat kebijakan quantitative easing yang kabarnya mulai diterapkan November tahun ini. Aksi para investor ini mengindikasikan kebijakan pembatasan injeksi likuiditas melalui pembelian obligasi oleh Bank Sentral AS tampaknya tidak signifikan memicu penarikan dana pemodal dari negara pasar berkembang.

Hal ini bisa dimaklumi karena insentif ke pasar keuangan oleh The Fed ternyata dikurangi secara bertahap dengan nilai penurunan yang tidak signifikan. Hal ini membuat para investor memilih tidak mengambil keputusan secara drastis. Pada saat yang sama, ekonomi China dan AS dikabarkan tidak cukup cemerlang, sehingga pasar negara berkembang dinilai

masih menarik untuk investasi.

Kebijakan tapering The Fed yang direncanakan dimulai akhir tahun ini dinilai tidak berdampak signifikan pada stabilitas sistem keuangan nasional. Akibatnya saham-saham seperti BBCA, ASII, ARTO, BTSP, dan PWON tetap direkomendasikan analisis. Analisis juga melihat peluang saham PGAS, AKRA, INDF, dan TLKM yang bisa dicermati. Katalis positif terkait dengan pengendalian Covid-19.

### LANGKAH BI

Senada dengan keyakinan pasar, Johanna Gani, CEO/Managing Partner Grant Thornton Indonesia meyakini, kebijakan tapering off yang bertahap



### LIKUIDITAS YANG LONGGAR DIDORONG OLEH KEBIJAKAN MONETER YANG AKOMODATIF DAN DAMPAK SINERGI BANK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH DALAM Mendukung PEMULIHAN EKONOMI.

**Perry Warjiyo,**  
Gubernur Bank Indonesia (BI)

tidak berdampak signifikan. Imbas paling serius dari taper tantrum 2013 yaitu merosotnya nilai tukar rupiah hingga puncak pelemahan terjadi pada September 2015 dimana pada akhir Mei 2013, kurs rupiah berada di level Rp 9.790/US\$ sampai pada 29 September 2015 menyentuh level terlemah Rp 14.730/US\$, yang berarti terjadi pelemahan lebih dari 50%. Sedangkan IHSG jatuh dari level 5.200 ke level 4.200 di akhir 2013.

“Namun secara keseluruhan dampak tapering off The Fed diprediksi tidak akan seberat 2013. Pertama, the Fed sudah sangat transparan dalam hal komunikasi khususnya prospek ekonomi seperti inflasi dan pengangguran, termasuk terkait rencana tapering off yang akan dilakukan tahun ini. Kedua, kondisi makro-ekonomi dalam negeri yang juga

lebih baik dibandingkan 2013, antara lain dengan cadangan devisa yang cukup tinggi mencapai US\$ 137,4 miliar pada Juli 2021. Angka cadangan devisa ini jauh lebih tinggi dibandingkan pada Juni 2013 yang hanya mencapai US\$ 98,1 miliar,” lanjut Johanna.

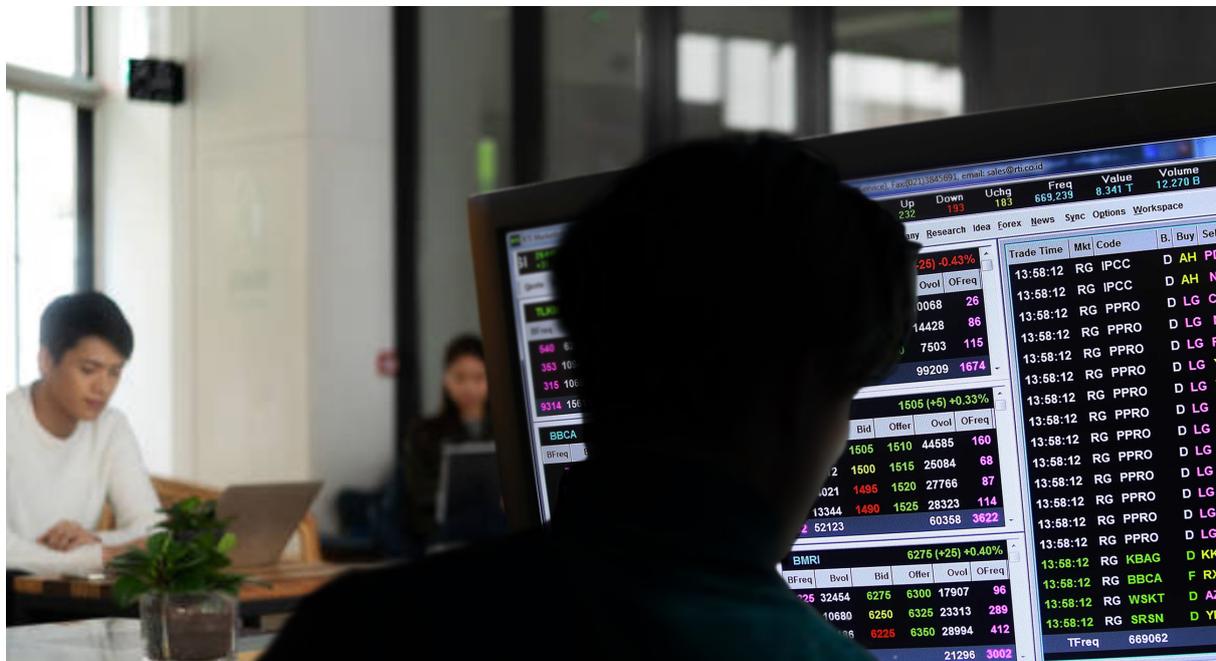
Johanna mengaku menudukung langkah BI sebagai regulator untuk mengantisipasi dampak tapering off dari jauh-jauh hari termasuk kesiapan untuk melakukan intervensi, seperti intervensi di pasar spot hingga pembelian SBN di pasar sekunder jika pihak asing melepas kepemilikan SBN mereka. Dengan adanya persiapan yang lebih matang, diharapkan dampak tapering off kali ini terhadap depresiasi rupiah masih berada dalam tahap yang wajar.

Sementara itu BI memastikan kondisi likuiditas aman lantaran hingga 15 Oktober BI telah menambah likuiditas (quantitative easing) ke industri perbankan hingga Rp129,92 triliun. Suntikan dana dari BI ke perbankan bertujuan menjaga likuiditas perbankan tetap terjaga dalam mendukung aktivitas intermediasi.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, likuiditas yang longgar didorong oleh kebijakan moneter yang akomodatif dan dampak sinergi Bank Indonesia dengan Pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi.

Pada sisi lain, Gubernur BI Perry Warjiyo juga menjamin tidak akan mengambil kebijakan drastis terkait pengurangan likuiditas melalui kebijakan tapering off. Seperti The Fed, BI pun akan melakukan pengurangan likuiditas (tapering) secara bertahap mulai tahun depan. Kebijakan ini tetap diharapkan bisa mendukung pertumbuhan ekonomi (pro-growth).

“(Likuiditas) dikurangi sedikit-sedikit tanpa berdampak pada kemampuan perbankan menyalurkan kredit dan kemampuan pemerintah terbitkan SBN sebab likuiditas (saat ini) sangat-sangat longgar. Stimulus stimulus terus kami lakukan bersama pemerintah untuk dukung pertumbuhan ekonomi” ujar Perry pada konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Selasa (19/10). □



# EMISI OBLIGASI & SAHAM MENUJU **RP 228 TRILIUN**

Nilai emisi obligasi telah mencapai Rp 78,58 triliun pada akhir Oktober 2021 dengan **kecenderungan meningkat dibanding tahun lalu**. Ditambah emisi saham, nilai penggalangan dana menuju Rp 228 triliun sekaligus capai rekor tertinggi.

**M**emasuki triwulan ketiga 2021, dunia usaha tampak mulai melihat peluang untuk lebih ekspansif. Hal ini bisa dilihat dari tren peningkatan emisi saham maupun obligasi. Berdasarkan data PT Perneringkat Efek Indonesia (Pefindo), hingga 22 Oktober 2021, total emisi obligasi dan sukuk sebanyak 79 emisi. Sebanyak dari 50 emiten ikut telah menerbitkan surat utang dengan nilai emisi mencapai Rp 78,58 triliun.

Sementara menurut catatan Bursa Efek Indonesia, sampai akhir Oktober, total obligasi dan sukuk yang tercatat di BEI sebanyak 482 emisi dengan nilai outstanding sebesar Rp425,60 triliun dan USD47,5 juta. Seluruh obligasi ini datang dari 126 perusahaan. Sementara itu, Surat Berharga Negara (SBN) yang tercatat di BEI sebanyak 141 seri dengan nilai nominal Rp4.437,58 triliun dan USD400,00 juta. Efek Beragun Aset (EBA) sebanyak 10 emisi senilai Rp5,39 triliun.

Menurut Pefindo, dana hasil emisi tahun ini mayoritas untuk refinancing utang dan modal kerja. Kepala Divisi Pemeringkatan Korporasi Pefindo Niken Indriarsih mengatakan, sampai akhir kuartal ketiga 2021, penerbitan surat utang mengalami kenaikan sekitar Rp 8 triliun dibandingkan periode sama tahun 2020 yang sebesar Rp 69,37 triliun. "Surat utang yang jatuh tempo pada 2021 cukup besar nilainya dan penerbitan itu juga untuk antisipasi refinancing surat utang ke depannya," ujar Niken dalam webinar Pefindo, Senin (18/10).

Meski demikian, penerbitan surat utang pada kuartal III-2021 turun menjadi Rp 34,19 triliun dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai Rp 39,34 triliun. "Kuartal III-2021 agak lebih sedikit, karena sudah tersebar. Penerbitan yang banyak itu ada di September Rp 16,4 triliun, Juli Rp 14,6 triliun, Maret Rp 12 triliun, dan April Rp 12 triliun," lanjut Niken.

Pada sisi lain, Pefindo menerima mandat pemeringkatan surat utang baru senilai Rp 28 triliun yang akan datang dari sektor multifinance, perkebunan, dan konstruksi merupakan yang tertinggi. Nilai emisi multifinance diperkirakan sebesar Rp 5,8 triliun, perkebunan Rp 3,5 triliun, dan konstruksi Rp 3 triliun.

Sebelumnya, Pefindo menilai bahwa perbankan tidak akan terlalu agresif melakukan penerbitan surat utang. Hal ini karena likuiditas yang melimpah dan tertahannya penyaluran kredit di tengah pandemi. Berdasarkan data per 30 September 2021, mandat pemeringkatan surat utang yang diperoleh Pefindo dari sektor perbankan hanya sebesar Rp 2,2 triliun.

Di sisi lain, Pefindo menilai bahwa gelombang kedua pandemi Covid-19 bisa mempengaruhi penerbitan surat utang korporasi pada semester II-2021. Namun, Pefindo berharap hal ini tidak berdampak serius, sehingga nilai penerbitan surat utang tahun ini tidak terlalu bergeser dari target awal pada kisaran Rp 122-159 triliun.

## BEREBUT DANA

Sementara itu Bursa Efek Indonesia melaporkan, sekitar 92 emiten saham dan obligasi berebut dana sedikitnya Rp 91,6 triliun menjelang tutup tahun. Sedangkan penggalangan dana yang sudah terealisasi sebesar Rp 136,9 triliun. Jika digabungkan dana yang

dimobilisasi korporasi dari pasar modal domestik tahun akan mencapai Rp 228,5 triliun.

Jika terealisasi, akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah pasar modal Indonesia. Dana-dana itu dihimpun para emiten lewat penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham, penerbitan saham baru untuk menambah modal (rights issue), serta emisi obligasi korporasi dan sukuk korporasi. Hasil penggalangan dana (fundraising) di pasar modal akan digunakan antara lain untuk membiayai ekspansi, menambah modal kerja, dan membayar utang.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Inarno Djajadi mengungkapkan, penggalangan dana di pasar

modal terus meningkat sejalan dengan kian bertambahnya jumlah investor. "Kondisi ini diharapkan semakin menggairahkan minat investasi di pasar modal Indonesia," ujar Inarno.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penggalangan dana di pasar modal, baik melalui IPO, rights issue, maupun emisi obligasi korporasi dan sukuk korporasi hingga 24 Agustus 2021 mencapai Rp 136,9 triliun, melonjak 199%



**PENGGALANGAN DANA DI PASAR MODAL TERUS MENINGKAT SEJALAN DENGAN KIAN BERTAMBAHNYA JUMLAH INVESTOR. KONDISI INI DIHARAPAN SEMAKIN MENGGAIRAHKAN MINAT INVESTASI DI PASAR MODAL INDONESIA.**

[Dirut BEI, Inarno Djajadi]

dari periode yang sama tahun lalu. Jumlah dana yang digalang dari pasar modal akan terus meningkat karena masih ada 92 emiten yang sedang memproses penawaran IPO, rights issue, serta emisi obligasi dan sukuk korporasi dengan nilai Rp 50,6 triliun.

Angka ini akan bertambah besar jika digabungkan dengan rights issue PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang mencapai Rp 95 triliun (Rp 41 triliun, sisanya inbreng). Jika ditambah rights issue BRI senilai Rp 41 triliun, penggalangan dana di pasar modal akan berkisar Rp 91,6 triliun. Selanjutnya, jika ditambah emisi yang sudah terealisasi Rp 136,9 triliun, total dana yang diraup korporasi dari pasar modal domestik tahun ini bakal mencapai Rp 228,5 triliun. Angka itu juga akan melampaui target yang dipatok OJK. Tahun ini, OJK menargetkan nilai penggalangan dana di pasar modal melalui penawaran umum mencapai Rp 150-180 triliun. □

# OJK BENTUK **TASK FORCE** KEUANGAN BERKELANJUTAN



Green economy tengah menjadi kesadaran industri keuangan dunia. Kesadaran yang sama pun tumbuh di industri keuangan Indonesia. Sebagai bentuk komitmen, OJK pun membentuk Task Force keuangan berkelanjutan termasuk melibatkan dana pensiun.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk Task Force Keuangan Berkelanjutan di sektor jasa keuangan (SJK). Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya otoritas mewujudkan pengembangan ekosistem keuangan berkelanjutan. Task force ini juga merupakan dukungan komitmen OJK pada upaya mitigasi serta adaptasi perubahan iklim (komitmen Paris Agreement) yang dituangkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC).

Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso dalam acara Kick Off Meeting Task Force Keuangan Berkelanjutan menjelaskan, bahwa task force ini bertujuan sebagai platform koordinasi terintegrasi SJK untuk membangun ekosistem keuangan berkelanjutan di Indonesia, termasuk keterlibatan dalam berbagai forum internasional.

“OJK melalui Sustainable Finance Roadmap yang sudah memasuki fase kedua ini berharap kepada sektor

jasa keuangan untuk dapat bersiap, memahami implikasi terhadap bisnis maupun ekspektasi domestik dan global serta tantangan kebijakan yang harus diterapkan di sektor jasa keuangan,” kata Wimboh dalam keterangannya, Selasa (5/10).

Langkah ini merupakan lanjutan dari keputusan OJK menerbitkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I (2015-2019) dan Tahap II (2021-2025). Peta jalan ini menjadi panduan untuk mempercepat penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola di Indonesia yang berfokus pada penciptaan ekosistem keuangan berkelanjutan secara komprehensif. Strategi ini melibatkan seluruh pihak terkait dan mendorong pengembangan kerja sama dengan pihak lain.

Dalam proses pembentukan task force, OJK melibatkan seluruh SJK baik perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank (IKNB). Tentu saja termasuk Dana Pensiun sebagai bagian dari IKNB.

Hal ini didasari pertimbangan bahwa isu perubahan iklim dan keuangan berkelanjutan (sustainable finance) telah menjadi perhatian global dan nasional. Keanggotaan task force yang terdiri dari 47 lembaga jasa keuangan yang mewakili asosiasi di industri perbankan, pasar modal dan IKNB, dengan rincian di industri perbankan terdapat 13 bank umum nasional (konvensional dan syariah), di pasar modal terdapat 7 emiten, 5 perusahaan efek dan 3 manajer investasi.

Dari IKNB, terdapat 5 asuransi umum, 6 asuransi jiwa, 3 perusahaan pembiayaan, 2 dana pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan PT Sarana Multigriya Finansial. Task force Keuangan Berkelanjutan OJK ini juga diharapkan bisa mempercepat respon terhadap berbagai perkembangan isu ini di tingkat internasional, seperti Konferensi PBB terkait Perubahan Iklim (COP ke-26) di Glasgow akhir Oktober ini, di mana semua negara akan menyampaikan kembali komitmen yang lebih eksplisit untuk mendukung penurunan emisi gas rumah kaca, termasuk komitmen dari Industri Keuangan untuk mendukung pembiayaan hijau.

## SAMBUT BAIK

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi menyambut baik inisiatif OJK dalam membentuk task force keuangan berkelanjutan ini. “Bank Mandiri sangat menyambut baik atas inisiatif ini, karena memang keharusan juga bagi kita untuk menyesuaikan dengan best practice secara internasional,” kata dia.

Sejalan dengan hal itu, saat ini penyaluran kredit kepada sektor energi baru dan terbarukan Bank Mandiri telah memiliki share sebesar 21% dari total kredit di sektor

energi atau sudah tumbuh 18% dalam lima tahun terakhir.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi menyampaikan apresiasi atas sejumlah kebijakan dan inisiatif yang dilakukan OJK terkait keuangan berkelanjutan. “Saya mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada OJK yang telah membuat roadmap keuangan berkelanjutan 2021-2025 yang merupakan fase kedua dan juga inisiatif lainnya melalui penerbitan POJK serta hari ini dengan pembentukan task force keuangan berkelanjutan,” ucap dia.

Direktur Manajemen Risiko PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Faaris Pranawa juga mengapresiasi upaya OJK dalam pembentukan task force sebagai upaya untuk menyeragamkan pemahaman akan keuangan berkelanjutan. “Kami senang sekali bisa hadir, karena menunjukkan leadership OJK untuk mendorong pembiayaan berkelanjutan ini sangat dibutuhkan, sehingga ke depan kita memiliki bahasa yang sama,” kata Faaris

Untuk memantapkan langkah ke depan, OJK menetapkan empat langkah strategis penerapan prinsip Keuangan Berkelanjutan yang efektif dalam menangani isu-isu terkait iklim, antara lain penyelesaian taksonomi



PEMBENTUKAN TASK FORCE KEUANGAN BERKELANJUTAN DIDASARI PERTIMBANGAN BAHWA ISU PERUBAHAN IKLIM DAN KEUANGAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE FINANCE) TELAH MENJADI PERHATIAN GLOBAL DAN NASIONAL.”

[Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso]

hijau, sebagai pedoman dalam pengembangan produk-produk inovatif dan atau keuangan berkelanjutan serta sustainable financial disclosure. Inisiatif ini juga sejalan dengan pengembangan regulasi mengenai pelaporan industri jasa keuangan ke OJK. Selain bagi SJK, taksonomi hijau diharapkan dapat dimanfaatkan oleh investor, lembaga/organisasi internasional, serta Pemerintah.

Dalam mengembangkan taksonomi hijau, OJK aktif ikut serta dalam FSB, khususnya terkait sustainable financial disclosure untuk Lembaga Jasa Keuangan dalam FSB - Workstream on Climate Disclosures/WSCD serta ASEAN Taxonomy Board di kawasan regional. Mengembangkan kerangka manajemen risiko untuk industri jasa keuangan dan pedoman pengawasan berbasis risiko untuk pengawas dalam rangka menerapkan risiko keuangan terkait iklim. Kemudian, mengembangkan skema pembiayaan atau pendanaan proyek yang inovatif dan feasible dan meningkatkan awareness dan capacity building untuk seluruh stakeholder. □

# SINERGI DANA PENSIUN PERTAMINA DAN DIRJEN DUKCAPIL DALAM Mendukung VALIDITAS DATA PESERTA

Oleh: Dana Pensiun Pertamina

**Dana Pensiun harus membayar secara tepat kepada orang yang berhak, baik Pensiunan, Janda/Duda maupun Anak. Karena itu, validasi data Peserta Pensiun harus mendapat perhatian besar. Untuk itu, kami mengambil langkah kerjasama dengan Dirjen Dukcapil.**

## PENGANTAR REDAKSI:

**T**ugas utama Dana Pensiun adalah mengelola dana yang berasal dari iuran pensiun, sehingga peserta memperoleh kepastian saat memasuki usia pensiun, dana selalu tersedia. Selain itu, keakurasian peserta terutama peserta pasif yaitu pensiunan, merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian dari Pengurus, terutama bila jumlah pensiunan cukup besar dan lokasinya juga tersebar di seluruh Nusantara. Prinsip tepat waktu, tepat jumlah dan tepat orang wajib menjadi fokus dari Pengurus, sebagai salah satu Dana Pensiun yang mengelola peserta cukup besar, Dana Pensiun Pertamina telah melakukan usaha mewujudkan prinsip tersebut, terutama dalam bidang keakurasian data peserta. Berikut adalah kiat bagaimana mewujudkan prinsip tersebut.

Memiliki data diri Pensiunan yang akurat dan valid merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan Dana Pensiun. Dana Pensiun Pertamina menyadari betapa tidak mudah memiliki data Pensiunan yang akurat dan valid tersebut. Karena setiap harinya terjadi dinamika perubahan data Pensiunan, baik domisili atau alamat, status pernikahan, dan apakah Pensiunan masih hidup atau tidak.

Ada saling keterkaitan antara akurasi dan validitas data dengan terjadinya kelebihan bayar Manfaat Pensiun. Akurasi data Pensiunan yang dimiliki suatu Dana Pensiun sangat berpengaruh terhadap jumlah kewajiban Manfaat

Pensiun yang harus dibayarkan oleh Dana Pensiun. Tentunya, semua Dana Pensiun menghendaki tidak ada kelebihan dalam membayar Manfaat Pensiun. Dengan kata lain, Dana Pensiun membayar tepat kepada orang yang berhak. Bukan membayar Manfaat Pensiun kepada yang tidak berhak, seperti Pensiunan Janda/Duda yang menikah lagi, atau Pensiunan/Janda/Duda/Anak yang sudah meninggal dunia, atau Anak yang secara hukum tidak memenuhi syarat lagi sebagai Peserta, contohnya telah melebihi usia tertentu, misalnya 21 (dua puluh satu) tahun yang tidak lagi dalam masa pendidikan/kuliah.

Selain itu, Dana Pensiun tidak dapat menggantungkan sepenuhnya kepada Pensiunan secara sepihak dalam hal akurasi dan validitas data. Persoalannya, validitas data Pensiunan dapat menjadi berkurang disebabkan oleh minimnya pemahaman Pensiunan dan keluarganya yang tidak melaporkan perubahan data terbaru, atau tidak lengkap saat melaporkan. Oleh karena itu, Dana Pensiun Pertamina terus berupaya melakukan Sosialisasi mengenai pelaporan perubahan data, baik melalui media sosial, pesan *broadcast*, majalah internal, organisasi Pensiunan maupun media lainnya.

Memang, kelebihan pembayaran Manfaat Pensiun merupakan risiko yang tak terhindarkan. Mungkin jumlahnya tidak signifikan bagi Dana Pensiun dengan dana kelolaan yang cukup besar. Namun risiko tersebut seyogyanya tetap dikelola dan terus diupayakan untuk diminimalisir sebagai wujud komitmen Dana Pensiun



**DAPEN PERTAMINA AKAN MELAKUKAN VALIDASI DATA PESERTA 71.065 ORANG.**

TERDIRI DARI PENSIUNAN SEBANYAK 44.020, PENSIUN TUNDA 209, PASANGAN PENSIUNAN 23.684, DAN PESERTA AKTIF 3.152 ORANG.”

dalam menerapkan Tata Kelola Dana Pensiun yang Baik (*Good Pension Fund Governance*).

Akurasi dan validitas data juga menjadi perhatian serius dan prioritas bagi Dana Pensiun Pertamina, karena data Pensiunan menjadi basis untuk perhitungan kewajiban dalam penyusunan Laporan Aktuaris. Data Pensiunan juga digunakan oleh Aktuaris internal Dana Pensiun dalam menghitung proyeksi. Dengan basis data yang akurat menghasilkan laporan yang handal (*reliable*) sehingga laporan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Dana Pensiun Pertamina menyadari tidak mungkin bekerja sendirian untuk memperoleh data terkini dengan jumlah Pensiunan mencapai 44.020 orang di seluruh pelosok wilayah RI, termasuk Pensiunan yang berdomisili di luar negeri. Validasi data Pensiunan menjadi kebutuhan Dana Pensiun, apalagi penggunaannya berlaku untuk jangka panjang.

Menyikapi pentingnya akurasi dan validitas data Pensiunan tersebut, mendorong Dana Pensiun Pertamina menerapkan strategi bekerjasama dengan Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri RI sebagai instansi Pemerintah yang mengelola administrasi data kependudukan berskala nasional. Melalui kerjasama dengan Dukcapil ini akan dilakukan sinkronisasi, verifikasi, dan validasi data Nomor Induk Kependudukan (“NIK”) serta status kependudukan Pensiunan, yakni masih hidup atau sudah meninggal dunia,

termasuk terhadap Peserta Aktif.

Dana Pensiun Pertamina sendiri akan melakukan validasi data Peserta dan Pensiunan beserta Pasangan keseluruhannya sebanyak 71.065 orang yang terdiri dari Peserta Pensiunan sebanyak 44.020 orang, Pensiun Tunda sebanyak 209 orang, Pasangan Pensiunan sebanyak 23.684, dan Peserta Aktif sebanyak 3.152 orang. Jumlah tersebut sudah termasuk untuk Pensiunan yang tinggal di luar negeri.

Saat berkunjung ke Kantor Ditjend Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri RI, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyambut positif kerjasama yang diinisiasi oleh Dana Pensiun



Bapak Yudi Wahyudi, Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina (kiri) menyerahkan plakat kepada Bapak Zudan Arif Fakrulloh, Direktur Jenderal Dukcapil, Kemendagri (kanan).

#### Beberapa manfaat yang akan diperoleh Dana Pensiun dari kerjasama dengan Dukcapil:

- Menjamin pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan tepat jumlah, tepat waktu serta tepat kepada yang berhak.
- Mencegah terjadinya kelebihan bayar Manfaat Pensiun.
- Memastikan kepada Pendiri dan Mitra Pendiri terkait validitas data untuk luran Tambahan dan luran Normal.
- Validitas data untuk perhitungan kewajiban aktuarial setiap tahun.
- Dana Pensiun mempunyai data terkini Pensiunan.

Pertamina, dan beliau menyampaikan pesan agar menjaga kerahasiaan data pribadi Peserta Pensiunan. Dan pernyataan beliau tersebut sangat sejalan dengan amanah UU No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun dimana dalam Pasal 54 Ayat (4) menyatakan Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing Peserta.

Pada akhirnya, sinergi Dana Pensiun Pertamina dengan Dukcapil, Kemendagri ini merupakan terobosan bagi Dana Pensiun Pertamina untuk melangkah maju dalam mewujudkan misinya, yaitu mengelola data Peserta dan mengembangkan dana guna memenuhi kewajiban membayar Manfaat Pensiun tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kepada yang berhak. □

# ADPI AWARD, YANG TETAP PERKASA DI MASA PANDEMI

Laporan oleh: **Arif Hartanto**

**P**rogram tahunan ADPI yaitu ADPI Award yang telah berlangsung selama hampir 20 tahun. Untuk kali ini berkaitan dengan ulang tahun ADPI ke 36, proses penilaian atas kinerja Dana Pensiun tahun 2020 yang diselenggarakan oleh ADPI, yang kita kenal dengan sebutan ADPI AWARD, telah diumumkan pada tanggal 7 Oktober 2021, bersamaan dengan kegiatan Webinar ADPI. Tim seleksi yang diketuai oleh pak Budi Sulistio dari Dapen Jasa Raharja dengan sejumlah anggota, menyeleksi 75 Dana Pensiun yang telah menyampaikan datanya. Dari 60 DP PPMP dan 15 DP PPIP, setelah diseleksi, terdapat sejumlah nominator untuk selanjutnya dilakukan wawancara oleh Tim dengan para Pengurus Dapen nominator tersebut, guna klarifikasi atas data yang disampaikan. Panitia beberapa kali melakukan rapat, bahkan rapat di malam hari, yang kadang berlangsung sampai dengan jam 22.00, penuh dengan segala argumentasi dengan tujuan agar putusan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Dari DP PPMP yang menyampaikan datanya, ROI terendah adalah dari 2.1% dan tertinggi 34,52%, sedangkan dari DP PPIP, return yang diperoleh terendah adalah 3.07% dan tertinggi adalah 14.16%.

Penghargaan dibedakan antara Dana Pensiun PPMP dan Dana Pensiun PPIP serta asset kelolaannya. Dari kriteria tersebut, untuk PPMP dikelompokkan sbb:

Untuk PPMP dikelompokkan menjadi DP dengan asset kelolaan sampai dengan Rp 100 milyar, asset kelolaan diatas Rp 100 m sampai dengan Rp 200 m, asset kelolaan diatas Rp 200m sampai dengan Rp 500 mliyar, asset kelolaan diatas Rp 500 milyar sampai dengan Rp 1 trilyun dan asset kelolaan diatas Rp 1 trilyun.

Untuk PPIP, dikelompokkan menjadi DP dengan asset kelolaan sampai dengan Rp 500 milyar dan asset kelolaan diatas Rp 500 milyar.

Setelah melalui proses wawancara, ditetapkan sebagai berikut:

## DPPK – PPMP Aktiva Bersih lebih dari Rp1 trilyun:

1. Terbaik Pertama: **DP BPD Jawa Tengah**
2. Terbaik Kedua: **DP Telkom**
3. Terbaik Ketiga: **DP BRI**



## DPPK – PPMP Aktiva Bersih lebih dari Rp.500 milyar s/d Rp.1 trilyun:

1. Terbaik Pertama: **DP Bank Mandiri Empat**
2. Terbaik Kedua: **DP Bank NTT**
3. Terbaik Ketiga: **DP Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur**



## DPPK – PPMP Aktiva Bersih lebih dari Rp. 200 milyar s/d Rp. 500 milyar

1. Terbaik Pertama: **DP Bank Riau Kepri**
2. Terbaik Kedua: **DP Pelni**
3. Terbaik Ketiga: **DP Bank Sulselbar**



DPPK – PPMP Aktiva Bersih lebih dari Rp.100 milyar s/d Rp.200 milyar

1. Terbaik Pertama:  
**DP Satya Wacana**
2. Terbaik Kedua:  
**DP Tirta Nusantara**
3. Terbaik Ketiga:  
**DP BASF Indonesia**



DPPK – PPMP Aktiva Bersih kurang dari atau sama dengan Rp.100 milyar

1. Terbaik Pertama:  
**DP Universitas Surabaya**
2. Terbaik Kedua:  
**DP Pegawai Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA**
3. Terbaik Ketiga:  
**DP Bank Bengkulu**



DPPK – PPIP Aktiva Bersih lebih dari Rp. 500 milyar

1. Terbaik Pertama:  
**DP Bank Central Asia**
2. Terbaik Kedua:  
**DP Bank Mandiri**
3. Terbaik Ketiga:  
**DP Pegawai Pembangunan Jaya Group**



DPPK – PPIP Aktiva Bersih kurang dari atau sama dengan Rp.500 milyar

1. Terbaik Pertama:  
**DP PPPK Petra**
2. Terbaik Kedua:  
**DP Pelindo Purnakarya**
3. Terbaik Ketiga:  
**DP PPIP Pusri**



Dana Pensiun Dengan Pengelolaan Terbaik atau Best Dapen 2020 adalah:  
**Dana Pensiun Bank Central Asia**



*Selamat kepada para pemenang,  
semoga prestasi ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan  
di masa-mendatang.*



Pengurus DP BCA dari kiri ke kanan: Wella Jaya Saputra [Direktur], Budi Sutrisno [Direktur Utama], Chaidir Nasution [Direktur], dan Mawassary Burhan [Direktur]

# KIAT DP BCA MERAIH PREDIKAT “BEST DAPEN 2020”

Dana Pensiun Bank Central Asia dinobatkan sebagai Best Dapen 2020. Apresiasi ini layak didapatkan jika melihat kiprahnya baik dalam mengelola manfaat bagi peserta maupun unit-unit usahanya. **Kultur siap bersaing, profesional, cegah intervensi, dan komunikasi yang cair** dengan pendiri bisa disebut sebagai kunci sukses Dana Pensiun BCA.

P erkumpulan ADPI belum lama ini menggelar malam apresiasi bagi Dana Pensiun berprestasi. Acara penghargaan The Best Dapen 2020 diselenggarakan sebagai bagian dari puncak acara HUT Asosiasi Dana Pensiun Indonesia ke-36. Salah satu nama Dana Pensiun yang mendapat apresiasi adalah Dana Pensiun BCA yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP).

Penghargaan pertama diberikan sebagai Dana Pensiun Terbaik Pertama kategori DPPK – PIIP dengan Aktiva Bersih lebih dari Rp 500 miliar. Saat ini, aset DP BCA tercatat sebesar Rp 5,3 triliun.

Selain menjadi yang terbaik di kelasnya, berkat keunggulan kinerja, Dapen Bank Central Asia juga dinobatkan sebagai Dana Pensiun dengan Pengelolaan Terbaik atau Best Dapen 2020. Penghargaan kedua diberikan karena oleh Dewan Juri, Dapen BCA dinilai menjadi yang terbaik dari seluruh pesaing di industri Dana Pensiun selama tahun buku 2020. Layak disebut Best of The Best.

Penghargaan itu pula yang jadi alasan Info Dana Pensiun menemui pengurus Dapen BCA, di salah satu unit usahanya, Hotel Aston Sentul Lake Resort & Conference Center, Bogor, Jawa Barat. Sudah pasti ada strategi, kiat, dan pengalaman berharga dari direksi Dapen BCA yang bisa dibagikan, yang kiranya bisa menjadi inspirasi bagi pelaku industri dana pensiun.

Salah satu keunggulan kompetitif Dapen BCA tidak lain terletak pada kemampuan mengoptimalkan unit usaha yang merupakan bagian dari strategi investasi penyertaan langsung. Menurut Direktur Utama Dapen BCA Budi Sutrisno, saat ini ada 7 unit usaha yang menjadi bagian dari penyertaan langsung Dapen BCA, dengan kepemilikan saham bervariasi.

Anak usaha pertama adalah PT Dana Purna Investama (DPI), yang bergelut di bidang building management dan office management. Perusahaan yang mempekerjakan sekitar 6 ribu pekerja ini berdiri tahun 2007 ini tercatat memiliki aset per September 2021 sekitar Rp 256 miliar, naik dari posisi akhir 2020 sebesar Rp 221 miliar. “DPI ini tidak hanya menggarap captive market di lingkungan BCA. Kita juga masuk ke Gedung BI, KCI, Danamon, juga di ITC Group. Sementara di beberapa kantor BCA kita malah kalah tender dibanding yang lain,” ujar Budi Sutrisno.

Dapen BCA juga punya memiliki unit usaha di bidang jasa pengelolaan uang tunai di bawah bendera PT Abacus Cash Solution (ACS). Perusahaan yang berdiri tahun 2002 ini melayani jasa penghitungan uang tunai, pengisian uang tunai pada ATM, penyediaan khasanah uang tunai, hingga jasa antar jemput dan pengamanan uang tunai. Pada bidang jasa ini, Abacus yang mempekerjakan sekitar 300 karyawan dikenal punya reputasi mumpuni. Nilai aset Abacus per September 2021 sebesar Rp 192 miliar, naik dari posisi Desember 2020 sebesar Rp 168 miliar.

Unit usaha ketiga PT Sentul Damai Resort (SDR) yang menggeluti bidang perhotelan dan pariwisata. Di kompleks Hotel Aston Sentul Lake Resort, SDR mengelola 212 kamar dan 8 villa eksklusif. Lewat SDR, Dapen BCA membuat perjanjian manajemen dengan PT Archipelago International Indonesia untuk pengelolaan Hotel Aston Sentul Lake Resort secara profesional. “Ini bukti bahwa sejak awal pengelolaan hotel ini kami percayakan penuh pada profesional dan orang-orang berpengalaman. Kami tidak ikut campur, cuma sebatas pengawasan melalui PT SDR sebagai pemilik,” ujar Budi Sutrisno.

Saat ini SDR yang mempekerjakan sekitar 500 karyawan dengan nilai aset per September 2021 sebesar Rp 63 miliar, naik dari tahun 2020 sebesar Rp 62 miliar. DP BCA tercatat sebagai pemegang 99,09% saham SDR. “Sisa sahamnya, bahkan hanya satu lembar milik PT DPI. Sementara DPI ini, 100% sahamnya milik DP BCA,” ujar Direktur DP BCA, Wella Jaya Saputra.

Dapen BCA juga tercatat sebagai pemegang saham PT Abacus Dana Pensiuntama (ADP) yang berdiri pada 2014. Dengan dukungan sekitar 1.000 karyawan, ADP menjadi pesaing saudaranya PT ACS. Meski demikian, jangkauan pelayanan pengisian uang tunai untuk ATM, cash processing centre (CPC), dan cash intransit (CIT) milik ADP tampak sangat. Bidikan ADP pada potensi-potensi diluar grup, terbukti perusahaan telah menjadi mitra Pertamina, Garuda, Alfamart, Indomarco, Blue Bird Group, selain Djarum Group yang menjadi induk BCA sebagai pendiri. Sampai September 2021 ADP mengantongi aset senilai Rp 39 miliar, meningkat dari akhir tahun sebelumnya sebesar Rp 32 miliar.

Masih dengan nama Abacus ada PT Abacus Teknika Solusindo (ATS) yang baru didirikan pada 2019. Jasa layanan service mesin, penyedia suku cadang, pengadaan, sampai pengembangan perangkat lunak. “Perusahaan ini didirikan karena kami melihat peluang bisnis dari tren transformasi digital. Secara kebetulan bersamaan dengan pandemi, transformasi digital menjadi kebutuhan yang mendesak, sehingga kami lihat ini merupakan pilihan yang tepat,” tutur Wella Jaya Saputra.

Di Kompleks Hotel Aston Sentul, terdapat gedung Pusat



Pelatihan (dormitory) bagi karyawan BCA, yang dikelola PT Sentral Layanan Prima (SLP) yang juga merupakan salah satu unit penyertaan langsung Dapen BCA. Perusahaan dengan aset Rp 187 miliar per September 2021 ini juga tercatat menekuni bidang jasa outsourcing, training management, pengelolaan parkir, jasa appraisal, juga sebagai konsultan penilai properti.

Khusus bidang jasa outsourcing, Dapen BCA masih memiliki penyertaan pada PT Danamas Insan Kreasi Andalan (DIKA). Perusahaan yang eksis sejak 2012 ini menggeluti jasa perekrutan, pelatihan dan penyaluran tenaga kerja khusus di bidang penjualan, operasional, human resources, hingga bidang IT. Melalui kontribusinya, DIKA sudah mempekerjakan sekitar tujuh ribu tenaga kerja. Aset perusahaan ini per September 2021 sekitar Rp 91 miliar, meningkat dari posisi Desember 2020 sebesar Rp 150 miliar.

Budi Sutrisno mengatakan, seluruh pilihan jenis penyertaan langsung yang digeluti merupakan hasil pembahasan manajemen. Pendiri memberikan kesempatan yang luas menentukan pilihan bisnis, meskipun secara prosedur pengurus berkonsultasi.

“Selain tidak ikut campur pada pengelolaan unit usaha Dapen, Pendiri arahnya jelas, pilih jenis usaha yang kalian pahami, dan ada profesional yang mengelolanya. Lagipula

komunikasi kita pengurus dengan wakil pendiri itu sangat mudah, jadi kalau ada yang mau kita diskusikan, setiap saat bisa disampaikan” tutur Budi Sutrisno.

Pendekatan Pendiri yang suportif ini, menurut Budi, karena culture profesional dan prudent yang sangat dijaga dan dipatuhi. Itu sebabnya, unit-unit usaha Dapen BCA tidak mengandalkan captive market dari grup karena sejak didirikan sudah diarahkan untuk bersaing. Agar bisa bersaing, selain mempercayakan pengelolaan pada figur profesional, juga menerapkan standar operasional yang tinggi.

### TANTANGAN PANDEMI

Seperti Dana Pensiun lainnya, Dapen BCA pun tak luput dari dampak pandemi Covid-19. Pada bisnis hotel dan resort misalnya, Hotel Aston Sentul sempat mengalaminya. Namun, hal itu tidak berlangsung lama. Lokasinya yang tidak jauh dari Jakarta, dan tidak bersinggungan lokasi wisata yang cenderung macet membuat unit bisnis Dapen BCA yang satu ini relatif cepat recovery. Bahkan ketika Info Dapen berkunjung pada weekdays, hotel ini justru ramai pengunjungan yang mayoritas rombongan.

Pandemi juga menjadi blessing in disguise bagi Dapen BCA yang pada 2019 menggagas bisnis digital. Transformasi digital yang sedang marak malam membuka peluang bagi PT Abacus Teknika Solusindo.

Itu sebabnya, walau tantangan krisis belum berakhir, DP BCA mampu membukukan kinerja yang relatif di atas performa industri secara keseluruhan. Selain sisi risk manajemen yang mumpuni dalam hal pengelolaan, DP BCA juga mencatat ROI sebesar 8,69% saat krisis akibat pandemi masih sulit dikenalikan. “Dari sisi comply, kita memang sangat siap dari sisi risk management. Kita juga cukup cermat dalam menyusun rencana bisnis kita, sehingga tingkat ketepatan bisa dibilang sangat bagus, karena sejauh ini tidak pernah di bawah target,” lanjut Budi.

Direktur DP BCA Chaidir Nasution menambahkan, tingkat kesehatan DP BCA, yang bersumber dari penerapan tata kelola yang baik, menjadi poin penting hingga meraih penghargaan sebagai DP terbaik. Selain itu, DP BCA juga punya profil risiko terukur karena karena peduli pada pengelolaan 8 risiko yang wajib diperhatikan Dapen yaitu risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit, risiko hukum, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko operasional, dan risiko strategis.

Share holder Dana Pensiun tidak lain adalah peserta sehingga tantangan kita adalah tepat waktu pembayaran manfaat dan tepat jumlah sehingga terjaga daro riksiko likuiditas. “Jika sisi ini tidak diperhatikan, akan berpengaruh pada tujuh risiko lain. Contohnya, kalau ada yang pensiun, lalu tidak ada dana untuk pembayaran manfaat, maka akan berpengaruh ke risiko reputasi, lalu ada risiko hukum. Imbasnya risiko kredit dipertanyakan, investasi kita prudent atau tidak, dan seterusnya. Jadi tingkat kesehatan ini sangat menentukan dalam penilaian

sebagai Dapen terbaik,” lanjut Chaidir Nasution.

Tantangan tahun ini bagi Pengurus DP BCA bukan pada persoalan Covid-19 yang berdampak pada kinerja. Tetapi lebih pada peningkatan pensiun normal yang di atas rata-rata sehingga tingkat klaim cenderung naik. Menurut perhitungan pengurus, jumlah pensiun normal cenderung meningkat secara konsisten dan mencapai puncak pada tahun 2026/2027.

Tren ini sebenarnya sudah dalam jangkauan perkiraan. Namun ada peningkatan klaim yang tajam karena jumlah yang resign pada 2021 dua kali lipat dibanding jumlah pensiun dini tahun 2020. Salah satu sebabnya, peralihan status syariah cabang BCA di Aceh yang membuat karyawan harus proses resign dahulu sebelum kembali bekerja di anak usaha Bank BCA Syariah.

“Selain itu ada kaitan dengan ketentuan UU Cipta Kerja yang terkait pesangon memang lebih sedikit dibanding undang-undang yang lama. Jadi ada kekhawatiran itu, sehingga banyak

yang pensiun dini sebelum undang-undang baru berlaku. Di satu sisi, ada tren di antara pegawai milenial yang pengen punya pengalaman kerja di perusahaan digital sehingga memilih resign,” ujar Direktur DP BCA, Mawassary Burhan.

Dari sisi nilai klaim, kondisi seperti ini memicu peningkatan signifikan sehingga memicu resiko defisit, atau selisih antara iuran dengan klaim pada tahun 2020 mencapai sekitar Rp 170 miliar. “Tahun ini, sampai September 2021, defisit kami hitung sudah mencapai Rp 230 miliar. Sementara keuntungan tahun ini, kami perkirakan sama

dengan tahun lalu sekitar Rp 263 miliar. Tersisa sekitar Rp 40 miliar, kalau klaim dalam 3 bulan lebih dari itu, berarti ada risiko untung kita nggak bisa nutup,” timpal Budi Sutrisno.

Melihat kondisi demikian, Pengurus sepakat posisi laba 2021 relatif sama dengan tahun 2020. Tetapi dari sisi aset investasi, per posisi September sedikit ada koreksi menjadi Rp 5,2 triliun. Namun, jika IHSG bisa mencapai level 6.700 atau bahkan 7.000, Pengurus melihatnya sebagai rezeki tak terduga bagi DP BCA.

Ada pula good news bagi DP BCA karena pada 2022 nanti, seiring transformasi digital di Bank Central Asia, dibuka banyak lowongan kerja di bidang IT dan PIC relationship. Langkah ini sebenarnya sudah dimulai tahun 2021 dan akan lebih masif pada 2022, sehingga dengan kehadiran banyak peserta baru, risiko defisit bisa ditekan untuk lebih terkendali. Tahun depan juga urusan pesangon karena kaitan dengan UU Cipta kerja bisa dikatakan tidak lagi menjadi isu bagi DP BCA untuk menata kinerjanya.

Untuk memastikan manajemen risiko tetap berjalan baik, DP BCA punya agenda rutin rapat koordinasi baik dengan pengawas maupun pendiri. Selain rapat rutin, terbuka agenda informal sesuai kebutuhan, karena koordinasi dinilai krusial untuk pengelolaan Dana Pensiun sesuai prinsip pengelolaan yang baik. □



PADA SETIAP UNIT  
BISNIS, ARAHAN  
PENDIRI SANGAT JELAS.  
**PILIH JENIS USAHA  
YANG KALIAN PAHAMI,  
DAN ADA PROFESIONAL  
YANG MENGELOLANYA  
SEHINGGA TIDAK  
MENJADI BEBAN.”**



Oleh: **Anang Rachmadi**  
[Direktur Utama Dana Pensiun RNI]

# DIGITALISASI DANA PENSIUN, PERLUKAH?

**“Potensi ekonomi digital Indonesia pada 2025 diperkirakan mencapai US\$ 124 miliar** atau meningkat pesat dari 2020 sebesar US\$ 44 miliar. Kementerian Perdagangan memprediksi ekonomi digital Indonesia berpotensi tumbuh delapan kali lipat pada 2030.”

**S**ekarang ini semua kalangan berbicara tentang istilah digitalisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ‘digital’ berarti berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu atau berhubungan dengan penomoran, sehingga ‘digitalisasi’ berarti proses pemberian atau pemakaian sistem digital. Di era pandemi Covid19 saat ini, pemerintah juga mendorong masyarakat menggunakan teknologi digital. Bahkan, pemanfaatan teknologi ini, menurut pemerintah, sudah suatu keharusan untuk mendukung tatanan kehidupan berdampingan dengan Covid19.

Dalam sebuah surat kabar harian ibu kota, senior economist Indef Aviliani menyatakan bahwa salah satu tantangan di era pandemi adalah digitalisasi ekonomi yang akan terjadi di berbagai sektor, dan membutuhkan perubahan dalam berbagai hal. Masih dalam pernyataannya, hal ini membutuhkan

kemampuan untuk membangun aplikasi yang sesuai serta kecanggihan infrastruktur teknologi. Semua ini didorong karena perubahan terhadap perilaku masyarakat dalam berinteraksi, bertransaksi dan berinvestasi. Beralih ke arah proses digitalisasi menjadi tuntutan karena adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pasar.

Pernyataan tersebut memang sejalan dengan data yang dilansir lembaga terkemuka. Data dari Google dan Temasek, perusahaan investasi raksasa di Singapura, menyatakan potensi ekonomi digital Indonesia pada 2025 diperkirakan mencapai US\$ 124 miliar atau meningkat pesat dari 2020 mencapai US\$ 44 miliar. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan juga memprediksi ekonomi digital Indonesia memiliki prospek dan potensi tumbuh delapan kali lipat pada 2030. Kepios, sebuah lembaga konsultan yang bermarkas di Singapura, memberikan data pengguna internet di Indonesia dapat dilihat pada info grafik.

## KESIAPAN DANA PENSIUN

Amanah Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 bahwa Dana Pensiun diperlukan sebagai upaya untuk memelihara kesinambungan penghasilan di hari tua bagi para peserta. Sistem pendanaan suatu program pensiun

memungkinkan terbentuknya akumulasi dana yang dibutuhkan untuk memelihara kesinambungan penghasilan peserta program pada hari tua. Keyakinan akan adanya kesinambungan penghasilan menimbulkan ketentraman kerja, sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan motivasi kerja karyawan dalam membentuk iklim yang kondusif bagi peningkatan produktivitas.

Sebagai sebuah badan hukum, Dana Pensiun dipastikan memiliki sifat interaktif dengan para pemangku kepentingan, melakukan transaksi dan kegiatan investasi yang melibatkan pihak lain. Tuntutan dunia luar yang cepat bertransformasi dengan proses digital, mau tidak mau, mendorong perubahan juga bagi Dana Pensiun untuk mengikutinya. David Rogers dalam bukunya 'The Digital Transformation Playbook' menuliskan lima fundamental perubahan perilaku konsumen yang tidak dapat menafikan proses perubahan terutama digitalisasi.

**PERTAMA**, Akses, lebih mudah-cepat-selalu sambung, yang berarti kebutuhan layanan sudah tidak mengenal jarak dan waktu. Setiap saat dibutuhkan sebuah layanan di saat yang sama informasi terhadap layanan tersebut bisa didapatkan. Akses terhadap internet yang dapat digunakan setiap saat dan setiap waktu adalah sebuah contoh sederhana, sehingga membuka layanan melalui portal internet menjadi tuntutan kekinian.

**KEDUA**, ikut serta sebagai sumber informasi, sebagai nilai tambah yang diminta dalam setiap layanan. Informasi tambahan bisa berupa data yang bersifat statis maupun interaktif. Memberikan layanan tanya-jawab adalah contoh sederhana yang membutuhkan respon cepat agar bisa memberikan kepuasan terhadap layanan.

**KETIGA**, fleksibel dan mudah diadaptasikan terhadap kebutuhan layanan, dibutuhkan sifat lincah terhadap perubahan kebutuhan dengan layanan. Layanan interaktif melalui videocall adalah contohnya, untuk mengurangi

interaksi langsung melalui tatap muka. Untuk itu harus disiapkan channel yang bisa melayani sekaligus customer service yang siap menyapa dengan ramah.

**KEEMPAT**, interaktif dalam setiap layanan, memberikan layanan konsultasi dan memberi solusi terhadap keluhan. Tidak terbatas pada handling complain tetapi menjadi konsultan bagi pelanggan adalah solusinya. Pendayagunaan semua SDM yang ada sebagai bagian dari layanan dan konsultan untuk semua permasalahan pelanggan sekaligus menyusun FQA (Frequently Questioned Answers) adalah salah satu implementasinya.

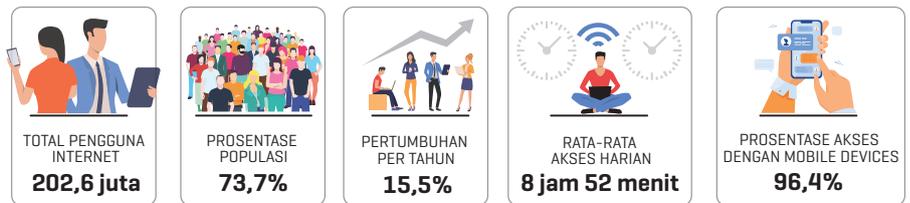
**KELIMA**, kolaborasi dengan semua pihak, melibatkan semua pihak untuk memberikan masukan dan kritikan

terhadap layanan. Perbaikan terhadap proses bisnis yang dimiliki seringkali didapat dari masukan pelanggan, namun demikian jangan sampai terlambatantisipasi karena kurang pergaulan alias kuper. Menyiapkan media atau unit yang siap menerima masukan sekaligus responsif terhadap masukan tersebut adalah salah satunya.

**LANGKAH YANG DIPERLUKAN**

Dana Pensiun yang tugas pokoknya menjaga kesinambungan penghasilan di hari tua bagi pesertanya juga harus melakukan penyesuaian dan beradaptasi dengan proses digitalisasi. Tidak mudah membalik telapak tangan dalam melakukan perubahan tersebut karena perlu edukasi dan sosialisasi yang tidak

Data berikut menunjukkan bahwa masyarakat kita sudah *well informed* dengan internet sekaligus mendukung data pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi digital di negara kita.



Sumber: **Keptos** (Jan 2021)



jarang melibatkan banyak pihak seperti vendor, konsultan dan pihak lain yang kompeten.

Untuk memahami setiap langkah yang diperlukan Dana Pensiun melakukan proses digitalisasi, terdapat tiga tipe transformasi digital dalam buku 'Building Digital Culture' yang ditulis oleh Thomas Brown dan Daniel Rowles di tahun 2017. Pertama, model bisnis dan value proposition yang baru. Value proposition secara umum adalah alasan pelanggan memilih kita dibandingkan yang lain. Langkah yang diperlukan adalah mempermudah akses atau komunikasi serta memberikan layanan yang lebih baik dengan perbedaan yang fundamental. Seperti perluasan fungsi komunikasi dan interaksi dengan menggunakan layanan online berbasis website atau media sosial lainnya.

Kedua, peningkatan proses bisnis operasional. Proses bisnis biasanya diukur dari kecepatan layanan, tentunya layanan sesuai kebutuhan pelanggan. Langkahnya antara lain mempercepat respons time dari setiap interaksi dengan pelanggan, baik respon yang interaktif langsung maupun melalui sarana online lainnya. Percepatan proses internal juga harus mendukung baik proses pengambilan keputusan maupun proses implementasi atas keputusan tersebut. Ketiga, optimalisasi kepuasan pelanggan, dengan membuat dan meningkatkan kenyamanan dengan layanan serta pendekatan pelanggan secara personal. Seperti melibatkan kegiatan pelanggan dalam hal ini peserta pensiunan dalam mengisi konten media sosial yang dimiliki Dana Pensiun.

#### STRATEGI KEDEPAN

Apabila sepakat bahwa proses digitalisasi menjadi suatu keharusan, maka strategi menjadi syarat mutlak untuk keberhasilannya. Ada dua variabel yang harus menjadi perhatian dan keduanya harus dilakukan peningkatan kemampuan secara berkelanjutan yaitu sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur. Infrastruktur berarti semua

sarana yang mendukung keberhasilan proses digitalisasi. Dari kedua variabel tersebut kemudian dikombinasikan dengan parameter kuat-lemah, strategi dapat disusun menjadi empat kuadran sebagai berikut:

**1 SDM KUAT - INFRASTRUKTUR KUAT**  
Dalam kuadran ini, organisasi kita sudah siap melaksanakan proses digitalisasi. Strategi utama tentunya menyusun skema implementasi sesuai dengan kebutuhan para peserta pensiun. Salah satunya adalah kemudahan akses, tentunya dibuat media berbasis online yang bisa diakses tanpa batas waktu dan tempat. Untuk data atau informasi yang mengandung unsur rahasia tentunya



PENYIAPAN TEKNOLOGI INFORMASI YANG MEMADAI HARUS DISIAPKAN DENGAN BAIK OLEH DAPEN MAUPUN ANAK USAHA. KARENA TEKNOLOGI INFORMASI DAPAT BERADAPTASI DENGAN SITUASI DAN KONDISI APAPUN, TERMASUK SAAT PENDEMI SEPERTI SEKARANG INI."

dibuatkan user dan password yang bersifat individual. Media online ini juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana informasi yang edukatif dan selalu up to date. Proses digitalisasi dengan pihak lain dalam hal ini pemangku kepentingan juga bisa segera diimplementasikan sehingga simplikasi proses bisnis bisa tercapai.

**2 SDM KUAT - INFRASTRUKTUR LEMAH**  
Organisasi di kuadran ini sudah memiliki SDM yang kompeten dan siap melakukan proses digitalisasi. Langkah awal dengan SDM yang kuat adalah menyusun timeline implementasinya. Langkah penyusunan timeline ini sangat penting karena memiliki korelasi dengan

budgeting, sehingga proses efisiensi belanja infrastruktur dapat disusun secara sistematis dan terstruktur sesuai jadwal yang disepakati. Manajemen pun bisa melakukan kontrol terhadap implementasi secara efektif.

**3 SDM LEMAH - INFRASTRUKTUR KUAT**  
Di kuadran ini, organisasi sudah menginvestasikan dana untuk belanja infrastruktur. Untuk langkah selanjutnya adalah menciptakan budaya inovasi yang mengarah ke proses digitalisasi. Proses pemilihan SDM yang kompeten menjadi sangat penting, semua akan bermuara pada proses penyusunan team work yang beranggotakan SDM terpilih. Tim ini akan berproses dengan pembelajaran proses digitalisasi dan studi banding. Tentunya semua proses ini harus disesuaikan dengan semua sarana yang sudah diinvestasikan. Alternatif lain untuk percepatan proses diantaranya merekrut SDM yang sudah kompeten dan melakukan transfer knowledge sambil berproses implementasi.

**4 SDM LEMAH - INFRASTRUKTUR LEMAH**  
Organisasi ini belum siap dan butuh waktu untuk persiapan lebih matang untuk melakukan proses digitalisasi. Semua langkah di kuadran 2 dan 3 harus dilalui, baik proses dilakukan secara seri maupun paralel tergantung terhadap urgensi dan sifatnya situasional. Prioritas utama dilakukan terhadap peningkatan kompetensi SDM yang sangat penting yang menjadi pondasi langkah di kuadran 2 dan 3.

Di balik besarnya efek proses digital ini, tetap perlu diikuti dengan pengawasan dan pengamanan khususnya terkait data pribadi yang ada. Seringkali didengar mengenai jual beli ataupun pencurian data sehingga dipastikan fungsi kontrol dan pengawasan yang baik. Segala usia kini memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi, sehingga dipastikan keamanan dan kenyamanan menjadi mandatory.



**Oleh: Siti Rakhmawati**  
(Direktur Investasi Dapen Telkom)

# INVESTASI BERBASIS ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL & GOVERNANCE)\*

“We have forgotten **how to be good guests**, how to walk lightly on the earth as its other creatures do.” —**Barbara Ward [1972]**

**K**alimat ini diucapkan oleh salah satu penulis buku *Only One Earth: The Care and Maintenance of a Small Planet* yang kemudian menjadi direktur pertama International Institute for Environment and Development, sebuah organisasi riset kebijakan dan aksi yang mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan menyambungkan prioritas lokal dengan tantangan global, yang menjadi cikal bakal ESG yang saat ini tengah marak.

Dalam laman <http://governansi.org/>, disebutkan bahwa ESG (atau kerap disebut Environmental, Social, and Corporate Governance /ESCG, Responsible Business Conduct /RBC, Co-Shared Value / CSV) merujuk pada tiga faktor sentral pengukuran dampak keberlanjutan dan etis dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi pada bisnis atau perusahaan tertentu yaitu Lingkungan, Sosial dan Governansi atau Tatakelola.

Investor umumnya menggunakan kriteria untuk ketiga faktor di atas dalam pertimbangan mereka untuk memilih investasi yang diambil.

**1. KRITERIA LINGKUNGAN:** Investor mempertimbangkan bagaimana perusahaan berkinerja dengan cara

ramah lingkungan, misalnya:

- Penggunaan energi ramah lingkungan;
- Pengelolaan limbah agar tidak menjadi polutan;
- Partisipasi dalam konservasi sumber daya alam tak tergantikan;
- Perlakuan wajar terhadap binatang yang tidak semena-mena; dan
- Penerapan sistem manajemen risiko yang efektif dalam pengelolaan risiko lingkungan.

**2. KRITERIA SOSIAL:** Investor mempertimbangkan bagaimana perusahaan mengelola hubungan kerja dengan para karyawan, pemasok, pelanggan, dan komunitas di mana mereka beroperasi, misalnya:

- Pemilihan pemasok yang juga memiliki kebijakan dan praktik ESG;
- Keterlibatan organisasi dalam pembangunan komunitas baik dalam bentuk persentase laba dan/atau

Mengacu pada publikasi CFA Institute Research Foundation tahun 2020 berjudul “ESG and Responsible Institutional Investing Around the World : A Critical Review”, isu utama ESG adalah sebagai berikut:

## ESG AND RESPONSIBLE INSTUTIONAL INVESTING AROUND THE WORLD

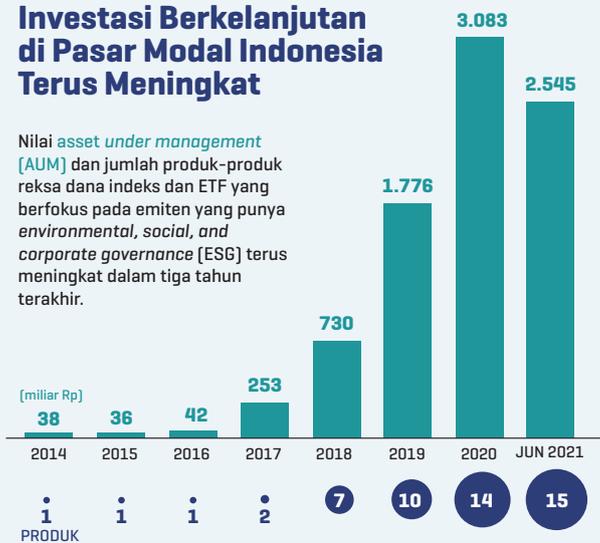
### MAIN ESG ISSUES

ENVIRONMENTAL	SOCIAL	GOVERNANCE
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Climate change and carbon emission</li> <li>● Natural resource use and energy and water management</li> <li>● Pollution and waste</li> <li>● Ecodesign and innovation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Workforce health and safety, diversity and training</li> <li>● Customer and product responsibility</li> <li>● Community and charitable activities</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Shareholder rights</li> <li>● Composition of board of directors (independence and diversity)</li> <li>● Management compensation policy</li> <li>● Fraud and bribery</li> </ul>



### Investasi Berkelanjutan di Pasar Modal Indonesia Terus Meningkat

Nilai *asset under management* [AUM] dan jumlah produk-produk reksa dana indeks dan ETF yang berfokus pada emiten yang punya *environmental, social, and corporate governance* [ESG] terus meningkat dalam tiga tahun terakhir.



SUMBER: BEI, BERITASATU RESEARCH

kerja sukarela para karyawan bagi komunitas;

- Pemastian lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi karyawan;
- Pemastian untuk mempertimbangkan masukan dan harapan pemangku kepentingan terhadap organisasi.

- 3. KRITERIA GOVERNANSI ATAU TATAKELOLA:** Investor mempertimbangkan bagaimana perusahaan membangun kepemimpinan yang mampu menjalankan prinsip tata kelola yang baik dan terlihat dalam struktur direksi dan dewan komisaris, sistem remunerasi direksi dan manajemen senior, sistem audit, pengendalian internal, dan perlindungan hak pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas, antara lain:
- Penggunaan metode akuntansi yang

sesuai dengan standar yang diharuskan;

- Pemastian bahwa semua pemegang saham diberikan kesempatan berpartisipasi dalam pengambilan suara untuk keputusan mengenai isu yang penting bagi organisasi;
- Pemastian tidak adanya 'konflik kepentingan' dalam pemilihan anggota direksi dan dewan komisaris;
- Pemastian tidak adanya kontribusi politik untuk memperoleh perlakuan istimewa dari penerima kontribusi;
- Pemastian tidak terlibat dalam kegiatan ilegal.

### ENVIRONMENTAL, SOCIAL & GOVERNANCE (ESG) DAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GROWTH (SDG)

ESG ini mengelaborasi tujuh belas tujuan pembangunan berkelanjutan atau

Sustainable Development Growth /SDG (<https://www.un.org/>) sebagai berikut:

- **Aspek sosial mengelaborasi tujuan-tujuan ESG sebagai berikut:**
  - Tujuan pertama: no poverty
  - Tujuan kedua: zero hunger
  - Tujuan ketiga: good health & well being
  - Tujuan keempat: quality education
  - Tujuan kelima: gender equality
  - Tujuan kedelapan: decent work & economic growth
  - Tujuan kesepuluh: reduce inequality
  - Tujuan kesebelas: sustainable cities & communities
  - Tujuan ke tiga belas: climate action
- **Aspek environmental mengelaborasi tujuan-tujuan ESG sebagai berikut:**
  - Tujuan keenam: clean water & sanitation.
  - Tujuan ketujuh: affordable & clean energy
  - Tujuan kedua belas: responsible consumption & production.
  - Tujuan keempat belas: life below water.
  - Tujuan kelima belas: life on land
- **Aspek governance mengelaborasi tujuan-tujuan ESG sebagai berikut:**
  - Tujuan kesembilan: industry, innovation & infrastructure.
  - Tujuan keenam belas: peace, justice & strong institution.
  - Tujuan ketujuh belas: partnership for the goals.

### IMPLEMENTASI ESG DI INDONESIA

Pemerintah IRI memiliki komitmen terhadap penerapan ESG. Setelah pembahasan yang cukup panjang, pada tahun 2004 Indonesia akhirnya resmi meratifikasi Protokol Kyoto yang memiliki concern kepada isu perubahan iklim. Pada tahun 2016 Indonesia juga menandatangani Perjanjian Paris yang merupakan kesepakatan global yang monumental untuk menghadapi perubahan iklim. Pemerintah Indonesia juga telah melaku-

**MSCI INDONESIA ESG LEADERS INDEX [USD]**

• SUMBER : MSCI.COM

**CUMULATIVE INDEX PERFORMANCE - GROSS RETURN [USD]**  
[AUG 2010 - SEP 2021]



**ANNUAL PERFORMANCE [%]**

YEAR	MSCI Indonesia ESG Leader	MSCI Indonesia
2020	-7.40	-7.46
2019	12.90	9.69
2018	-9.61	-8.70
2017	26.20	24.79
2016	23.14	17.52
2015	-17.67	-19.08
2014	28.42	27.21
2013	-20.02	-23.10
2012	4.98	5.22
2011	10.59	6.50

**INDEX PERFORMANCE - GROSS RETURN [%] [SEP 30, 2021]**

	1 Mo	3 Mo	1 Yr	YTD	ANNUALIZED			Since Aug 31, 2010
					3 Yr	5 Yr	10 Yr	
<b>MSCI Indonesia ESG Leaders</b>	3.22	10.10	25.21	-4.38	3.10	1.39	2.65	<b>3.97</b>
<b>MSCI Indonesia</b>	3.43	9.49	27.06	-3.62	2.40	0.57	1.45	<b>2.51</b>

**FUNDAMENTALS [SEP 30, 2021]**

Div Yld [%]	P/E	P/E Fwd	P/BV
1.48	27.79	25.81	3.86
2.53	19.63	15.07	2.27

**INDEX RISK AND RETURN CHARACTERISTICS [AUG 31, 2010 - SEP 30, 2021]**

	Beta	Tracking Error [%]	Turnover [%] <sup>1)</sup>	ANNUALIZED STD DEV [%] <sup>2)</sup>			SHARPE RATIO <sup>2,3)</sup>				MAXIMUM DRAWDOWN	
				3 Yr	5 Yr	10 Yr	3 Yr	5 Yr	10 Yr	Since Aug 31, 2010	[%]	Period YYYY-MM-DD
<b>MSCI Indonesia ESG Leaders</b>	1.01	2.98	64.76	28.61	24.11	22.61	0.22	0.14	0.20	<b>0.26</b>	44.60	2020/01/24 - 2020/03/30
<b>MSCI Indonesia</b>	1.00	0.00	8.26	27.98	23.66	22.33	0.19	0.10	0.15	<b>0.20</b>	48.29	2018/01/26 - 2020/03/19

<sup>1)</sup> Last 12 Months

<sup>2)</sup> Based on monthly gross returns data

<sup>3)</sup> Based on ICE LIBOR 1 M

kan beberapa reformasi kebijakan untuk menarik sektor swasta berinvestasi di sektor berkelanjutan. Salah satunya melalui penerbitan omnibus law UU Cipta Kerja, yang mereformasi beberapa undang-undang dan peraturan guna menarik lebih banyak investasi dari sektor swasta dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.

OJK juga memiliki komitmen terhadap penerapan ESG. Pada tanggal 5 Oktober lalu OJK melakukan kick off meeting Task Force Keuangan Berkelanjutan di Sektor Jasa Keuangan yang terdiri dari 47 lembaga jasa keuangan yang mewakili asosiasi di industri perbankan (13 bank umum nasional konvensional dan syariah); pasar modal (7 emiten, 5

perusahaan efek, dan 3 manajer investasi), IKNB (5 asuransi umum, 6 asuransi jiwa, 3 perusahaan pembiayaan, 2 dana pensiun, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, LPEI, dan PT SMF).

Inisiatif ini merupakan upaya mewujudkan pengembangan Ekosistem Keuangan Berkelanjutan, serta bentuk dukungan komitmen OJK pada upaya mitigasi serta adaptasi perubahan iklim (komitmen Paris Agreement) yang dituangkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC).

OJK juga sudah mengeluarkan berbagai kebijakan, arahan, maupun peraturan, seperti mengeluarkan road map untuk sustainable finance, di mana tahap I sudah dimulai sejak 2015 dan

dilanjutkan dengan terbitnya road map tahap II, yang dimulai tahun 2021 sampai 2025. Fokusnya adalah menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi untuk mewujudkan keuangan berkelanjutan.

OJK berharap pada tahun 2025, seluruh pelaku industri keuangan secara bertahap akan wajib menyampaikan laporan keberlanjutannya. Ini mulai dari perbankan besar, kemudian perbankan menengah-kecil serta emiten besar, sedang, dan kecil. Sampai awal September 2021, terdapat sekitar 144 perusahaan listed yang sudah menyampaikan sustainability report. baik yang sudah mendapatkan kewajiban maupun yang secara voluntary.

## PERBANDINGAN KINERJA IHSG, INDEKS LQ45 DAN INDEKS ESG SRIKEHATI

• SUMBER BLOOMBERG



### DAMPAK IMPLEMENTASI ESG

Green and sustainable menjadi satu elemen penting dari pemulihan ekonomi pascapandemi yang diinginkan oleh masyarakat global. Dalam konteks ini, transisi ekonomi rendah karbon telah mengemuka kembali dalam diskusi global governance terkini.

Namun untuk mencapai masa transisi ekonomi rendah karbon tersebut, tidak hanya pertumbuhan dan kesejahteraan yang berkelanjutan yang diperoleh, melainkan terdapat pula risiko bagi ketenagakerjaan maupun masyarakat yang perlu dimitigasi dengan baik.

UNFCC mencatat terdapat potensi sekitar 1,5 miliar pekerja akan terpengaruh oleh transisi ini secara global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam berbagai forum mempromosikan jargon yang juga merepresentasikan kepentingan emerging market dan development ekonomi, dengan transisi yang tidak saja **adil** tetapi juga **terjangkau** sehingga diharapkan akan menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan, yang tentunya merupakan aspirasi dari seluruh masyarakat global.

### MENGAPA INVESTASI BERBASIS ESG

Saat ini investor sudah tidak lagi beranggapan bahwa hal-hal yang tidak ramah terhadap ESG sebagai externalities di luar investment yang dapat dikompensasikan dengan Corporate Social Responsibility / CSR. Dengan kesadaran ini CSR lebih cenderung dianggap sebagai legitimasi sosial yang bersifat superfisial sehingga investor ingin menginvestasikan dananya kepada perusahaan yang secara internal mengakomodasi nilai-nilai ESG karena investasi tidak lagi dianggap bersifat bebas nilai.

Meningkatnya tuntutan dari para investor global ini tercermin dari bertambahnya anggota Principles for Responsible Investment (PRI), dengan dana kelolaan dunia US\$ 100 triliun pada 2020 dari sebelumnya US\$ 59 triliun tahun 2015. Jumlah pengelola dana yang bergabung pun semakin meningkat.

OJK juga memberikan insentif kepada corporate action perusahaan, antara lain untuk penerbitan green bond. September kemarin Pemerintah RI menerbitkan global green bond sebesar 500 juta Euro. Dengan **permintaan yang cukup tinggi dari investor, Pemerintah**

dapat menerbitkan SDG bond tanpa tambahan new issue concessions (NIC) yang biasanya diberikan sebagai insentif agar investor tertarik membeli bond baru yang merupakan tambahan pasokan di pasar.

Bursa Efek Indonesia juga menunjukkan komitmennya dengan penerbitan indeks-indeks bertema ESG. Jumlah dana kelolaan atau asset under management dari reksa dana dan ETF yang berbasis indeks green, terus menunjukkan peningkatan dan minat yang meningkat tajam dari waktu ke waktu.

Penerapan ESG diyakini dapat mendorong kinerja perusahaan menjadi lebih

baik. Sebanyak 88% perusahaan yang diteliti memperlihatkan korelasi yang positif akan kinerja operasionalnya pada saat mereka mempraktikkan ESG dengan baik. Sementara itu, sebanyak 80% perusahaan menunjukkan kinerja pergerakan harga saham yang juga lebih baik serta valuasi yang lebih baik.

Hal ini terlihat dalam data sebagai berikut, di mana indeks ESG memberikan return dan risk adjusted return (yaitu Sharpe ratio) yang lebih tinggi serta valuasi (dalam bentuk rasio price to earning, price to earning forward, maupun price to book value) yang lebih tinggi.

### STRATEGI INVESTASI ESG

Mengacu pada publikasi CFA Institute Research Foundation tahun 2020 berjudul "ESG and Responsible Institutional Investing Around the World: A Critical Review", terdapat beberapa strategi berinvestasi ESG sebagai berikut:

1. **Screening:** mengidentifikasi perusahaan yang akan menjadi pilihan investasi,
  - a. negative screening (mengacu pada daftar negative sector, perusahaan atau praktik yang



**KITA TIDAK MEWARISI BUMI DARI NENEK MOYANG, TAPI KITA MEMINJAMNYA DARI ANAK CUCU KITA.**

- berdasarkan kriteria spesifik ESG untuk tidak dipilih),
- b. positive screening (mengacu pada daftar yang memiliki kinerja ESG lebih baik untuk dipilih), atau
  - c. norm based screening (mengacu pada standar minimum dari praktik bisnis yang mengacu pada norma internasional)

**2. Thematic:** berinvestasi di aset yang ramah ESG, seperti clean energy, green technology, sustainable agriculture, atau social bonds yang dananya akan dialokasikan untuk project sosial.

**3. Integration:** Penerapan factor-faktor ESG secara inklusif dalam analisis finansial dan evaluasi investasi.

**4. Engagement**

- a. Individual: tim investasi menggunakan posisi tawarnya sebagai pemegang saham untuk mempengaruhi perilaku perusahaan, baik melalui komunikasi dengan senior senior management dan direksi perusahaan dan menyampaikan proposal pemegang saham.
- b. Collaborative: berkolaborasi dengan investor lain dalam melakukan Tindakan di atas.
- c. Internal voting: penggunaan hak suara dengan mengacu pada guideline ESG guidelines secara internal (tidak diwakilkan kepada service provider eksternal).

**INVESTASI ESG BAGI INVESTOR INSTITUSI**

Dalam publikasi CFA Institute tahun 2010 berjudul “Elements of An Investment Policy Statement For Institutional Investors” (<https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/article/position-paper/investment-policy-statement-institutional-investors.ashx>) diberikan referensi struktur praktik terbaik arahan investasi yang menjadi pedoman dalam menjalankan mandat investasi. Selain tata kelola dan manajemen risiko, bagian penting lain adalah bagian investasi, tujuan return dan risiko

yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- penetapan tujuan investasi secara keseluruhan,
- persyaratan risiko dan return yang mencerminkan optimalisasi investasi,
- toleransi terhadap risiko,
- constraint investasi yang dapat bersumber dari hukum, regulasi dan kebijakan internal,
- pertimbangan investasi lain yang terkait dengan strategi investasi, antara lain pendekatan filosofis terhadap investasi yang dapat mencakup berbagai dimensi seperti efisiensi pasar, tingkat oportunitas yang terantisipasi; kemauan untuk memasukkan faktor ESG dalam pengambilan keputusan, dan seterusnya.

Sebagai ilustrasi, pada tanggal 13 Oktober yang lalu Department of Labors US memberikan usulan aturan yang secara eksplisit memberikan izin kepada pengelola dana retirement untuk mempertimbangkan faktor perubahan iklim dan ESG dalam pemilihan investasi dan menggunakan hak-haknya sebagai pemegang saham.

**SERTIFIKASI ESG**

Dengan luasnya isu serta masih beragamnya pemahaman tentang investasi ESG ini, pada Maret 2021 yang lalu CFA Institute, sebuah organisasi profesi investasi yang memiliki misi “to lead the investment profession globally by promoting the highest standards of ethics, education, and professional excellence

for the ultimate benefit of society” mengumumkan inisiatif untuk menerbitkan standar di bidang investasi ESG, yang bertujuan untuk memperkuat integritas pasar dengan menyediakan benchmark pengetahuan dan skill yang diperlukan para profesional investasi untuk mengintegrasikan faktor ESG dalam proses investasi. Penerbitan standar yang akan dilanjutkan dengan program sertifikasi ini direncanakan akan dilakukan pada tanggal 1 November 2021.

Program ini pada awalnya dikembangkan dan diaward oleh CFA Society UK dan telah diadopsi oleh CFA Institute serta dikembangkan oleh para praktisi terkemuka dan diakui oleh UN PRI (Principle for Responsible Investment), sebuah badan independent yang mendorong investor untuk menggunakan kegiatan investasi untuk mencapai return yang lebih tinggi sekaligus mengelola risiko bisnis dengan lebih baik.

**PENUTUP**

Isu ESG saat ini memang semakin marak. Dan semoga serta tampaknya tidak akan hanya tumbuh semusim sebagaimana cendawan di musim hujan. Karena tuntutan ini tidak hanya datang dari negara maju dan investor global, namun juga sangat dekat dengan kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu saya terkejut-kejut ketika anak perempuan saya yang berusia 13 tahun dan mulai rajin bercermin, minta dibelikan perawatan wajah merk A sambil menyebutkan tidak mau memakai merk B. Ketika saya tanya mengapa, jawabnya adalah karena merk B tidak animal-cruelty-free, tidak menggunakan konsep daur ulang, dan tidak bebas bahan kimia.

Ternyata generasi yang sering diremehkan sebagai generasi micin ini mulai memiliki kesadaran ESG secara inklusif. Hal ini semakin menyadarkan bahwa “kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang, tapi kita meminjamnya dari anak cucu kita.”

\*] **Siti Rakhmawati** [Direktur Investasi Dana Pensiun Telkom]. Tulisan ini disiapkan untuk kegiatan advokasi CFA Society Indonesia



## IN-HOUSE TRAINING UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Bertempat di kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), pada tanggal 7 dan 8 September 2021 telah diselenggarakan pelatihan Manajemen Umum Dana Pensiun (MUDP) bagi staf di UMM, sebagai persiapan untuk peremajaan kepengurusan di Dana Pensiun UMM. Sebanyak 12 orang peserta dengan tekun mengikuti pelatihan yang diberikan oleh Direktur Eksekutif ADPI, pak Bambang Sri Mulyadi. Setelah selesai pelatihan di hari selanjutnya diselenggarakan ujian Sertifikasi MUDP, dari 12 peserta tersebut 10 orang dinyatakan lulus, 2 orang yang belum berhasil kemudian mengikuti ujian sertifikasi MUDP secara on-line sebagai peserta dari Jadwal Ujian MUDP yang diselenggarakan oleh LSDDP. 2 peserta tersebut dinyatakan lulus... selamat yaa...

## WEBINAR ADPI

Terkait dengan peringatan ulang tahun ADPI ke 36 yang jatuh pada tanggal 27 Agustus 2021, ADPI menyelenggarakan Webinar dengan tema yang menarik “Kesiapan Dana Pensiun Menghadapi Perubahan Akibat Pandemi”. Webinar menampilkan nara sumber yang kompeten di bidang masing-masing, yaitu bu Dewi Astuti, Kepala Departemen Pengawasan IKNB 1A OJK, pak Eduard Guntoro Purba, Ketua Dewan Pengawas DP BCA, pak Halim Gunawan, aktuaris dan Pak Sularno, Dirut Dapenma PAMSI.

Moderator adalah pak Chairi Pitono I dari Dapen Astra Satu berhasil membuat acara menarik bagi peserta yang berjumlah lebih dari 500 peserta. Acara dibuka oleh pak Suheri, Ketua ADPI, dilanjutkan dengan key-note address oleh Bpk Achmad Nasrullah dari OJK. Acara ini berlangsung sampai dengan lepas tengah hari, dilanjutkan dengan pengumuman para pemenang ADPI Award 2020. Selamat buat para pemenang.

**ADPI**

**WEBINAR & ADPI AWARD**  
07 OKTOBER 2021

**KESIAPAN DANA PENSIUN  
MENGHADAPI PERUBAHAN AKIBAT PANDEMI**

**Sambutan Pengarahan,  
Pembukaan Webinar dan ADPI Award**  
AHMAD NASRULLAH Kepala Departemen Pengawas IKNB 2A OJK

**DISKUSI PANEL**  
Relaksasi Regulasi,  
Rencana Regulasi dan Isu Terkini Industri Dana Pensiun  
DEWI ASTUTI Kepala Departemen Pengawas IKNB 1A OJK

**Peranan Pengawas Dana Pensiun  
Untuk Mencapai Kesuksesan Dalam Berbagai Situasi**  
EDUARD GUNTORO PURBA Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun BCA

**Pemilihan Tingkat Bunga Aktuarial  
Sebagai Strategi Pendanaan Tinjauan Asset & Liability**  
HALIM GUNAWAN Aktuaris

**Review**  
SULARNO  
Direktur Utama Dapenma Pamsi

**Moderator**  
CHAIRI PITONO  
Direktur Dana Pensiun Astra Satu

Live On:  
**Zoom GRATIS !!**  
Jam : 08.30 - 13.00 WIB

ID 856 0191 3238  
PASSCODE: adpi1234

adpi\_association | https://www.adpi.or.id | Perkumpulan ADPI



# DIKLAT & WORKSHOP ONLINE

November - Desember 2021



## JADWAL DIKLAT DAN WORKSHOP ONLINE/VIRTUAL NOV & DES 2021

	NOV	DES
Manajemen Umum Dana Pensiun	9 - 10	7 - 8
Manajemen Risiko Dana Pensiun	23 - 24	14 - 15
Penyusunan Rencana Bisnis Tahunan Dana Pensiun	-	-
Manajemen Pendanaan dan Kepesertaan Dana Pensiun	29 - 30	-
Penyusunan Pedoman Manajemen Risiko	-	7 - 8
Manajemen Pengawasan Dana Pensiun	2 - 3	-
Manajemen Investasi Dana Pensiun	-	-
Manajemen Investasi Dana Pensiun (tingkat Lanjutan)	-	14 - 15
Aktuarial Dana Pensiun	16 - 17	-

BIAYA  
**3,5**  
JUTA



**INFORMASI** LEBIH LANJUT:

Mengenai formulir pendaftaran dan teknis pelaksanaan bisa hubungi

Contact Person: **Marissa/Nisa** : 021-2514050 / [diklat@adpi.or.id](mailto:diklat@adpi.or.id)